

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PUNGUTAN HASIL
PERIKANAN (PHP) DI DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : YOGA HENDY ISMOKO
NPM : 2343021069
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Adminitrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

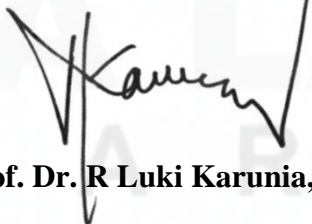
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Yoga Hendy Ismoko
NPM : 2343021069
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP) at the Directorate General of Capture Fisheries, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. R Luki Karunia, M.A

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yoga Hendy Ismoko
Npm : 2343021069
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP) at the Directorate General of Capture Fisheries, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia*

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Pukul : 13.00 s.d. 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Hidayaturahmi, MPA

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Pembimbing : Prof. Dr. R Luki Kurnia, M.A



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yoga Hendy Ismoko**
NPM : **2343021069**
Jurusan : **Administrasi Publik**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan Negara**
Konsentrasi : **Manajemen Keuangan Negara**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat dengan judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2025
Penulis,



Yoga Hendy Ismoko

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Yoga Hendy Ismoko

E-mail: yoga.hendy84@gmail.com

POLITEKNIK LAN JAKARTA

Strategi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pungutan Hasil Perikanan (PHP) mencakup penerapan pasca-produksi, sistem penangkapan terukur, penguatan tata kelola, pengumpulan data, dan kolaborasi antara Pusat dan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan PNBP PHP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat kinerja optimal PNBP PHP. Studi ini memiliki dua tujuan utama (1) mengidentifikasi dan menganalisis alasan kinerja suboptimal di sektor perikanan, dan (2) mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan PNBP PHP. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen. Hambatan internal utama meliputi implementasi kebijakan yang tidak efektif, kebutuhan akan kebijakan manajemen yang direvisi, dan dukungan pemangku kepentingan yang tidak memadai. Tantangan eksternal meliputi penangkapan ikan ilegal, pengawasan yang terbatas, ketidakpatuhan, hambatan geografis, masalah regulasi, dan faktor sosioekonomi. Strategi yang direkomendasikan meliputi implementasi sistem PNBP pasca-produksi, peningkatan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, dan pendidikan bagi peserta industri perikanan, sistem pemantauan dan digitalisasi izin harus disempurnakan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. Keunggulan sektor perikanan meliputi kebutuhan akan peraturan yang sederhana dan sistem digital untuk izin dan pembayaran. Kelemahan ada pada pelabuhan perikanan pantai yang butuh pelatihan. Peluang termasuk kewajiban pelaporan hasil tangkapan, sedangkan ancaman mencakup peningkatan kepatuhan dan dukungan untuk usaha kecil.

Kata Kunci: PNBP, PHP, *Illegal Fishing*, CIPP, SWOT

ABSTRACT

Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP) at the Directorate General of Capture Fisheries, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

Yoga Hendy Ismoko

E-mail: yoga.hendy84@gmail.com

POLITEKNIK LAN JAKARTA

The strategy to increase Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP) includes the implementation of post-production, a measured capture system, strengthened governance, data collection, and collaboration between the central and regional governments. This study aims to increase PNBP PHP in the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This study identifies internal and external factors that hinder the optimal performance of PHP NRE. The study has two main objectives: (1) to identify and analyze the reasons for suboptimal performance in the fisheries sector, and (2) to develop strategies to increase PHP NRE revenue. Using qualitative methods, data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis. Key internal barriers include ineffective policy implementation, the need for revised management policies, and inadequate stakeholder support. External challenges include illegal fishing, limited surveillance, noncompliance, geographical barriers, regulatory issues, and socioeconomic factors. Recommended strategies include implementing a post-production PNBP system, improving law enforcement, upgrading infrastructure, and educating fisheries industry participants. Monitoring systems and permit digitization must be improved to prevent illegal fishing. The strengths of the fisheries sector include the need for simple regulations and a digital system for permits and payments. Weaknesses lie in coastal fishing ports that require training. Opportunities include mandatory catch reporting, while threats include increased compliance and support for small businesses.

Keywords: PNBP, PHP, Illegal Fishing, CIPP, SWOT

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas selesainya tesis berjudul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”**. Tesis ini merupakan hasil dari perjalanan intelektual yang menantang selama studi di Politeknik STIA LAN Jakarta. Terinspirasi oleh mata kuliah manajemen keuangan, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu dalam keuangan negara dan menanggapi kebutuhan untuk mengoptimalkan pendapatan PNBP PHP sektor perikanan, meskipun menghadapi keterbatasan data dan masalah penjadwalan wawancara, dukungan dari berbagai pihak membantu penulis mengatasi tantangan tersebut, ucapan terima kasih yang tulus dan khusus disampaikan kepada:

1. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Bapak **Dr. Bambang Giyanto, M.Pd** beserta seluruh staf Program Studi, atas fasilitas dan dukungan akademik yang telah diberikan.
2. Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. R Luki Karunia, M.A**, yang dengan sabar dan penuh kearifan membimbing saya dalam setiap tahap penelitian ini, nasehat, kritik, dan saran dari beliau sangat berharga dalam menyempurnakan tesis ini.
3. Dukungan dari tempat penulis bekerja dan rekan-rekan dari Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menyelesaikan penulisan tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Administrasi Pembangunan Negara Khususnya Manajemen Keuangan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua. Aamin... Aamin YRA.

Jakarta, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Lembar Persetujuan Tesis	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iv
Absrak	v
<i>Abstrak</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Riwayat Hidup Penulis.....	xii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Permasalahan	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	26
1. Tinjauan Kebijakan	26
2. Tinjauan Teoritis	37
C. Operasional Konsep.....	58
D. Kerangka Berfikir	59
Bab III Metode Penelitian	
A. Metode Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data	63

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	69
E. Objek Penelitian	75
F. Instrumen Penelitian	75

Bab IV Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum	80
1. Sejarah KKP	81
2. Visi dan Misi	81
3. Tugas dan Fungsi.....	82
4. Tujuan KKP.....	83
5. Struktur Organisasi KKP	83
6. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	84
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	85
1. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan PNBP PHP Dari Skema Pasca Produksi.....	86
2. Strategi Peningkatan PNBP PHP Skema Pasca Produksi	97
C. Analisa Hubungan Kinerja Teori CIPP dan Analisa Model SWOT	100
D. Hasil Analisa Peningkatan Penerimaan PNBP PHP Pasca Produksi	102
1. Aspek Context	103
2. Aspek Input	107
3. Aspek Proses	111
4. Aspek Product	116
E. Strategi Peningkatan Penerimaan PNBP PHP di KKP.....	120
F. Triangulasi Dokumen Sumber Data	127

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNBP Penangkapan Ikan Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 1.2	Data Acuan Produksi Perikanan Tangkap PNBP-PHP Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan Tahun 2020-2023.....	9
Tabel 2.1	Pemetaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2	Penelitian Sekarang.....	25
Tabel 2.3	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	25
Tabel 2.4	Tarif Atas PNBP PHP Perikanan Pada KKP.....	35
Tabel 3.1	Daftar <i>Key Invormant</i>	66
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara.....	76
Tabel 4.1	Hubungan Kinerja Teori CIPP dan Analisa Model SWOT.....	101
Tabel 4.2	Strategi Peningkatan PNBP PHP Sektor Perikanan Menggunakan Analisa SWOT.....	121
Tabel 4.3	Strategi Peningkatan PNBP PHP Sektor Perikanan Tangkap berbasis Teori Manajemen Ilmiah Frederick Taylor.....	123
Tabel 4.4	Timeline Implementasi 3 Tahun untuk Strategi Peningkatan PNBP PHP Perikanan Tangkap berbasis Scientific Management (<i>Frederick Taylor</i>).....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen Model CIPP	55
Gambar 2.2	Model SWOT	57
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir	60
Gambar 3.1	Model Analisis Data	71
Gambar 3.2	Triangulasi Sumber Data	74
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KKP	84

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis : Yoga Hendy Ismoko
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta/04 Desember 1984
Alamat Rumah dan : Jl. Waru No.69, RT.011, RW.011, Kel. Gedong,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
Nomor Telepon Genggam : 0856-9200-8560
Email/Surel : yoga.hendy84@gmail.com
Status Perkawinan : Menikah
Nama Instansi : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nomor Telepon : 021-3519070
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
Riwayat Pendidikan : S-1 Akuntansi/Universitas Gunadarma/2008
Riwayat Pekerjaan : - Direktorat Perizinan dan Kenelayanan,
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2010 s.d
2023)
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi
Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
(2023 s.d sekarang)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 70% (5,8 juta km²) dari luas Indonesia adalah lautan, adapun keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan. Potensi sumber daya ikan (SDI) mencapai 12,01 juta ton per tahun yang berada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dari total potensi tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 8,64 juta ton per tahun, secara rinci produksi perikanan tahun 2022 mencapai 24,85 juta ton dengan kontribusi perikanan tangkapnya 7,99 juta ton. Komoditas ekspor produk perikanan Indonesia meliputi udang, tuna, kerapu, kakap, tenggiri, *tilapia*, *cephalopoda* (*squid*, *ocopus*, *cuttlefish*), daging kepiting ranjungan, kepiting, rumput laut, teripang, lobster, komoditas perikanan tersebut diolah menjadi produk perikanan berupa produk akhir (Statistik Perikanan Indonesia, BPS, 2022) dan untuk pengelolaan sumber daya ikan dan sarana pendukung lainnya perlu adanya satu kesatuan armada untuk menangkap ikan yaitu dengan kapal penangkap ikan.

Administrasi Pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang sudah dibuat oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, administrasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam kerjasama untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Administrasi Pembangunan Negara (APN) berfokus pada cara pemerintah menangani berbagai urusan publik. Ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, serta pengaturan aktivitas pembangunan. Selain itu, ini juga mencakup analisis tentang lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, bersamaan dengan elemen lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kebijakan publik dan manajemen. Kajian ini melibatkan banyak aspek, mulai dari

pembentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan di beragam sektor. Peran fungsi APN sangat vital dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif dan efisien serta dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya publik untuk mencapai maksud yang telah ditentukan. Pentingnya pembangunan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan finansial, melainkan juga dengan manajemen dan administrasi yang efektif. APN berperan dalam memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai guna mendukung proses pembangunan (Biswan AT & Kusumo DPP, 2021). Terdapat beberapa karakteristik utama dalam administrasi pembangunan sebagai berikut:

1. Fokus pada perubahan, bertujuan untuk menciptakan dampak positif dalam sejumlah aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Pembangunan yang terencana dilakukan dengan perencanaan yang matang, mulai dari perencanaan strategis hingga penerapan program-program pembangunan.
3. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, seperti anggaran dan tenaga kerja, dengan cara yang efisien untuk mencapai sasaran pembangunan dan pengelolaan pembangunan menggunakan sumber daya negara.
4. Pendekatan lintas disiplin, yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan manajemen, untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
5. Peran aktif pemerintah, pemerintah memiliki fungsi yang krusial dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, serta memantau jalannya program-program pembangunan.

Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan melalui penerapan ilmu dan praktik administrasi publik dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Administrasi Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing bangsa melalui pengelolaan sumber daya dan penyusunan kebijakan yang tepat (Dunn WN,

2003).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup semua penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) negara selama satu tahun anggaran (Ma'aruf, D.A., 2016). APBN memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi, APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya negara untuk berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sosial
2. Distribusi, APBN berperan dalam mendistribusikan pendapatan negara kepada masyarakat, misalnya melalui subsidi, bantuan sosial, dan program pembangunan
3. Stabilisasi, APBN dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga nilai tukar mata uang
4. Sumber pendapatan negara, APBN berasal dari berbagai sumber pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya
5. PNBPN meliputi berbagai penerimaan dari sumber lain, seperti hasil dari pengelolaan aset negara, denda, dan hasil usaha
6. Hibah, merupakan bantuan dari negara lain atau lembaga internasional

Tujuan utama APBN adalah untuk mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses dengan banyak dimensi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kepala dan total pendapatan negara. Proses ini juga memperhitungkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan memperkuat hubungan ekonomi di

tingkat regional (Machmud, S. , 2015). Kenaikan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per orang dalam suatu negara meningkat, yang merupakan salah satu tanda kemajuan ekonomi. Perubahan dalam struktur ekonomi sering kali melibatkan pergeseran dari sektor utama seperti pertanian ke sektor industri dan jasa.

Upaya memperbaiki kualitas hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan akses lebih baik kepada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Pemerataan pendapatan juga menjadi salah satu elemen vital dalam pembangunan ekonomi, dengan tujuan mengurangi ketimpangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi, yang bisa dinilai dari tingkat pendidikan dan kemampuan membaca serta menulis di masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan faktor lingkungan dan sosial untuk menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang (Junaidi I. et al. , 2020).

Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan juga harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya secara bijak, sehingga dapat mencapai kemajuan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan antara lain:

1. Meningkatkan akses barang dan layanan, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memperbesar produksi serta distribusi barang dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian
2. Mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan ekonomi berusaha untuk menciptakan kesempatan finansial dan meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling rentan
3. Meningkatkan kualitas hidup, pembangunan ekonomi berupaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk

- mengurangi perbedaan pendapatan di antara kelompok kaya dan miskin
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus memperhatikan efek terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan sumber daya alam
 6. Menciptakan kesempatan kerja, pembangunan ekonomi berusaha membangun peluang kerja baru dan memperbaiki kualitas pekerjaan yang sudah ada
 7. Mengembangkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang baik, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
 8. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat, pembangunan ekonomi perlu memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan ekonomi, tanpa melihat latar belakang atau status sosial

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan standar hidup, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi serta sosial bagi semua kelompok masyarakat.

Administrasi Keuangan Negara, adalah aktivitas yang berkaitan dengan urusan keuangan, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas (Kartika, et al 2015). Keuangan negara terdiri dari semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta BUMN/BUMD dan lembaga lain yang terkait. Dalam perspektif objek, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam uang, termasuk kebijakan dan tindakan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan aset negara yang terpisah.

Secara umum, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan rapi, dengan mematuhi peraturan yang berlaku, serta harus efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Hal ini diatur dalam undang-undang, termasuk APBN/APBD, perubahan APBN/D, dan

laporan tahunan pelaksanaan APBN/APBD. Fungsi dari APBN/APBD pada dasarnya adalah untuk memberi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan menjaga stabilitas (Pujanira et al., 2017). Administrasi keuangan negara memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut:

1. Investasi, berfungsi sebagai sarana dalam pengelolaan dana negara untuk investasi yang mendatangkan keuntungan bagi negara.
2. Pencarian dana, ialah cara untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti pajak dan pinjaman.
3. Pembelanjaan, istilah pembelanjaan mengacu pada penggunaan dana negara untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Tujuan utama dari semua ini adalah untuk memastikan penggunaan keuangan negara berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran negara dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup semua aktivitas yang terkait dengan penerimaan, penggunaan, dan akuntabilitas keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta akuntabilitas atas segala aspek keuangan negara (Fitrawansyah, 2015).

Kapal Perikanan adalah kapal yang dibangun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha penangkapan ikan dengan ukuran, rancangan kapasitas muat, akomodasi, mesin serta berbagai perlengkapan yang secara keseluruhan disesuaikan dengan fungsi dalam rencana operasi, dan kapal perikanan ini yang menangkap ikan dan selanjutnya sebagai dasar pengambilan (Fyson, 1985 dalam bentuk dek, Novita et al, 2007). Kapal perikanan terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran dari ukuran kecil berupa sampan atau perahu nelayan dari kayu yang memakai dayung dan layar hingga kepada kapal-kapal perikanan yang terbuat dari besi baja dengan ukuran lebih dari 100 Gross Tonnage (GT) dengan menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Menurut Iskandar dan Pujianti (1995) dalam Iskandar dan Novita (1997), kapal perikanan dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan metode pengoperasian alat yang dioperasikannya yaitu (a) kapal yang

mengoperasikan alat yang statik (*static gear*) *gillnet, longline, lift net*, pole dan lainnya, (b) kapal yang mengoperasikan alat yang ditarik (*towed gear/dragged gear*) *trawl, tonda* dan lainnya, (c) kapal yang mengoperasikan alat yang dilingkarkan (*encircling gear*) *purse seine*, payang dogol dan lainnya, (d) kapal yang mengoperasikan lebih dari dua alat tangkap yang berbeda pengoperasiannya (*multipurpose*).

Pungutan Hasil Perikanan (PHP), merupakan pungutan yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Berdasarkan Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko serta surat edaran SE KP No. B.1090.MEN-KP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, maka target PNBPN yang telah ditetapkan sebesar 3,5 Trilyun. Pungutan hasil perikanan pascaproduksi merupakan PNBPN yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan setiap kali melakukan pendaratan Produksi perikanan tangkap adalah hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan

pertumbuhan ekonomi nasional. PNBPN meliputi obyek PNBPN yan diklasifikasikan dalam enam klaster yaitu (a) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, (b) Pelayanan, (c) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, (d) Pengelolaan Barang Milik Negara, (e) Pengelolaan Dana dan (f) Hak Negara Lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah bagian dari pembukaan UUD 1945, di mana pemerintah menjalankan berbagai fungsi dan kegiatan dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang sangat penting dan strategis adalah keuangan, yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pengelolaan urusan pemerintahan di semua aspek. Negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum kepada rakyat mengelola pemerintahan berdasarkan konstitusi (Absor U. et al. , 2022). Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A dalam UUD menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya, yang bersifat wajib untuk kepentingan negara, harus diatur oleh undang-undang. Tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan, mengatur, melindungi masyarakat, memastikan hukum, serta mengelola kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, bisa menghasilkan penerimaan negara yang dikenal sebagai PNBPN (Filadelfia G. , 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBPN didefinisikan sebagai pungutan yang dibayarkan oleh individu atau badan yang mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari jasa atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNBPN merupakan penerimaan pemerintah pusat yang berbeda dengan pajak dan hibah, yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Penerimaan negara berasal dari sumber-sumber yang diatur dalam undang-undang, termasuk penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah. Secara umum, PNBPN memiliki dua fungsi: fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (Sitepu et al. , 2023).

Sebagai fungsi anggaran, PNBPN berperan sebagai sumber pendukung bagi penerimaan negara. PNBPN memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pajak. PNBPN berkontribusi sekitar 26,9% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Pada tahun 2018, realisasi PNBPN meningkat signifikan menjadi Rp. 407 triliun atau meningkat 147,77% dari target serta tumbuh 30,86% dibandingkan realisasi PNBPN tahun 2017. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengaturan PNBPN mendukung kegiatan negara/pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi reguler dan fungsi anggaran PNBPN dalam mendukung kegiatan negara/pemerintah (Hastuti, 2018).

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi PNBPN menggunakan data runtun waktu (*time series*) volume nilai tahun 2020-2024 melalui perizinan kapal penangkap/pengangkut ikan seperti pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data PNBPN Penangkapan Ikan Tahun 2020-2024

TAHUN	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBPN)		
	PPP (RP)	PHP (RP)	JUMLAH (RP)
2020	11.981.922.713	513.703.598.892	525.685.521.605
2021	28.657.832.500	674.849.832.993	703.507.665.493
2022	58.258.605.000	1.122.244.701.497	1.180.503.306.497
2023	46.064.207.827	590.829.145.441	636.893.353.268
2024	41.767.779.082	910.051.687.641	951.819.466.723
TOTAL	186.730.347.122	3.811.678.966.464	3.998.409.313.586

Sumber: KKP, 2025

Sedangkan dasar menentukan untuk faktor PNBPN-PHP dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah data runtun waktu (*times series*) menggunakan produksi perikanan tangkap tahun 2020-2023 seperti pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Data Acuan Produksi Perikanan Tangkap PNBPN-PHP Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan Tahun 2020-2023

TAHUN	PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN PERIKANAN TANGKAP (TON)		
	PERAIRAN LAUT	PERAIRAN DARAT	JUMLAH
2020	6.494.140	494.950	6.989.090
2021	6.767.565	456.936	7.224.501
2022	7.412.411	575.291	7.987.702
2023	7.236.704	608.897	7.845.601
TOTAL	27.910.820	2.136.074	30.046.894

Sumber: KKP, 2025

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang sifatnya terbatas dan dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan

kematian maupun penangkapan akan dapat memulihkan sumberdaya tersebut ke tingkat produktivitas semula. Sumberdaya perikanan laut terdiri dari ikan pelagis dan ikan demersal. Sumber daya perikanan ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat optimum dapat diperoleh, yaitu manfaat bagi masyarakat luas, pelaku usaha, dan juga menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan.

Penerapan Kebijakan PNBP, penerapan kebijakan PNBP pasca-produksi pada sektor perikanan tangkap dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kepatuhan pelaku usaha, dan optimalisasi penerimaan negara. Namun berdasarkan hasil evaluasi lintas sumber, yaitu hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta informasi dari media dan pelaku usaha, ditemukan bahwa realisasi PNBP justru mengalami penurunan meskipun aktivitas penangkapan dan volume produksi meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa desain dan implementasi kebijakan PNBP pasca-produksi belum mampu menjamin optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan atas nilai sumber daya ikan nasional.

Ketidaksesuaian antara Produksi Riil dan PNBP yang dipungut, dengan hasil pengawasan Itjen dan pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa basis pengenaan PNBP didasarkan pada laporan produksi kapal, bukan pada data transaksi penjualan atau nilai ekonomi riil hasil tangkapan. Dalam praktiknya, volume ikan yang dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan hasil tangkapan yang sebenarnya yaitu (a) tidak adanya sistem verifikasi silang antara logbook kapal, data VMS, data pendaratan ikan di pelabuhan, dan data penerimaan di unit pengolahan atau eksportir, (b) masih terdapat praktik under-reporting hasil tangkapan oleh kapal. Akibatnya, PNBP yang dihitung dan dibayarkan menjadi lebih kecil dibandingkan potensi yang seharusnya diterima negara (BPK, Tahun 2024).

1. Skema Tarif Tidak Mencerminkan Nilai Ekonomi Riil Ikan, dalam kebijakan pasca-produksi, tarif PNBP dihitung berdasarkan harga patokan dan estimasi produksi, bukan berdasarkan harga transaksi aktual di pasar. BPK dan

Itjen menemukan bahwa harga patokan yang digunakan umumnya lebih rendah dibandingkan harga jual ikan, khususnya untuk komoditas ekspor bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, dan udang. Dengan demikian, meskipun nilai ekonomi hasil tangkapan tinggi, PNBPN yang masuk ke kas negara hanya merepresentasikan sebagian kecil dari nilai riil sumber daya yang dieksploitasi.

2. **Lemahnya Sistem Penagihan dan Pengendalian Tunggakan**, dalam beberapa temuan audit, diketahui bahwa masih terdapat tunggakan PNBPN pasca-produksi yang tidak tertagih secara efektif, hal ini disebabkan oleh (a) sistem penagihan dan e-billing yang belum terintegrasi penuh dengan sistem keuangan negara, (b) tidak diterapkannya sanksi administratif yang tegas, seperti pembekuan izin atau penahanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal yang belum melunasi kewajiban PNBPN, (c) kapal masih dapat terus beroperasi meskipun memiliki kewajiban PNBPN yang belum diselesaikan. Kondisi ini menyebabkan PNBPN kehilangan sifat kepastian penerimaan dan berubah menjadi piutang yang berisiko tinggi tidak tertagih.
3. **Ketidakseimbangan antara Kinerja Produksi dan Kinerja Fiskal**, dalam laporan kinerja KKP, indikator keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan jumlah kapal terdaftar, volume izin usaha, dan volume produksi, bukan pada realisasi penerimaan negara. Akibatnya, terjadi situasi di mana capaian produksi terlihat meningkat, tetapi kontribusinya terhadap PNBPN justru menurun. Hal ini menunjukkan adanya distorsi dalam desain indikator kinerja yang tidak mengaitkan pemanfaatan sumber daya alam dengan penerimaan negara.
4. **Transaksi Komersial di Luar Sistem Pengawasan Negara**, berdasarkan informasi media dan asosiasi pelaku usaha, sebagian besar hasil tangkapan ikan dijual melalui rantai pasok swasta (cold storage, eksportir, dan broker) tanpa keterkaitan langsung dengan sistem PNBPN. Negara hanya menerima data dari laporan kapal, bukan dari transaksi jual beli yang sesungguhnya. Akibatnya, negara tidak memiliki akses terhadap harga, volume transaksi, dan nilai ekonomi aktual yang menjadi dasar pengenaan pungutan.

Dampak terhadap Keuangan Negara dan Sumber Daya Ikan, kondisi di atas mengakibatkan dua kerugian strategis bagi negara:

1. Kehilangan potensi penerimaan negara, karena PNBP yang dipungut lebih rendah dari nilai ekonomi sumber daya ikan yang dieksploitasi.
2. Risiko eksploitasi berlebihan (*overfishing*) meningkat karena biaya pemanfaatan sumber daya menjadi relatif murah, sehingga mendorong peningkatan penangkapan tanpa diimbangi dengan kontribusi fiskal yang memadai.

Dengan kata lain, kebijakan PNBP pasca-produksi telah memindahkan risiko usaha dari pelaku usaha kepada negara, baik dalam bentuk risiko fiskal maupun risiko keberlanjutan sumber daya. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa penurunan PNBP perikanan tangkap pasca-produksi bukan disebabkan oleh menurunnya aktivitas usaha, melainkan oleh kelemahan desain kebijakan dan sistem pengendalian antara lain (a) basis pungutan tidak berbasis transaksi ekonomi riil, (b) tarif tidak mencerminkan nilai pasar ikan, (c) pengawasan dan penagihan tidak efektif, (d) sistem data dan indikator kinerja tidak berorientasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan PNBP pasca-produksi belum memenuhi prinsip optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan sumber daya ikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesimpulan dari BPK adalah optimalisasi PNBP perikanan tangkap hanya dapat dicapai apabila pemanfaatan sumber daya ikan dikaitkan secara langsung dengan nilai ekonomi riil dan penerimaan negara, bukan sekadar volume administratif.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah masalah, yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala penerimaan PNBP PHP pada skema praproduksi kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT yang telah ditetapkan sebagai acuan dasar untuk perhitungan PNBP PHP pascaproduksi belum optimal.

2. Peningkatan penerimaan PNBPH pada skema pascaproduksi pada kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT yang telah ditetapkan masih rendah.
3. Pengelolaan PNBPH pada skema pascaproduksi dalam mendukung migrasi izin daerah ke pusat pada kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT belum terintegrasi dan belum optimal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil PNBPH yang dilakukan sebagai dasar untuk memperoleh analisa stok sumberdaya ikan masih bersifat parsial/tidak menyeluruh.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengelolaan skema pascaproduksi yang mempengaruhi proses penerimaan PNBPH masih rendah terhadap kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan pengelolaan PNBPH pascaproduksi penangkapan ikan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku/pemilik kapal di zona penangkapan ikan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan PNBPH kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT dari skema pascaproduksi.
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan PNBPH skema pascaproduksi kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai acuan untuk analisa pencapaian

pengelolaan PNBP PHP dan menjadi dasar rekomendasi praktis kepada pimpinan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dan manfaat kebijakan, untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka mengembangkan dan memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola sumber daya ikan di lapangan.

2. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan atas teori keberlanjutan pengelolaan PNBP PHP berhubungan dengan aturan pelaksanaan sumber daya ikan secara lestari dan manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di perikanan, khususnya terkait dengan strategi peningkatan pengelolaan PNBP PHP pada sektor perikanan tangkap.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan analisis menggunakan model CIPP, pengelolaan skema pascaproduksi yang memengaruhi proses penerimaan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan berukuran di atas 30 GT masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya aspek konteks dan input, seperti keterbatasan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pascaproduksi, serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem pelaporan produksi, pengeluaran hasil, dan pembayaran PNBP. Dari sisi proses, pelaksanaan pengawasan dan verifikasi data produksi pascaproduksi belum berjalan konsisten, sehingga berdampak pada rendahnya capaian hasil (product) berupa realisasi PNBP PHP yang belum optimal.
- b. Selanjutnya, berdasarkan analisis SWOT, strategi peningkatan pengelolaan PNBP PHP pascaproduksi di zona penangkapan ikan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pelaku atau pemilik kapal. Meskipun terdapat kekuatan berupa kerangka regulasi dan peluang dari potensi sumber daya ikan, kelemahan internal seperti rendahnya kepatuhan pelaporan dan ancaman berupa praktik under-reporting serta keterbatasan pengawasan menyebabkan strategi yang dirumuskan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi strategi melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha, integrasi sistem pascaproduksi, serta pengawasan berbasis risiko agar pengelolaan PNBP PHP dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
- c. Analisis penurunan PNBP-PHP menggunakan model CIPP untuk evaluasi kebijakan publik, dalam konteksnya pergeseran kebijakan ke beban pasca-produksi membebani negara dengan mengalihkan risiko ke perusahaan dan

menyoroti masalah seperti oligopoli di industri perikanan dan pasar ekspor yang lebih kuat yang memengaruhi penetapan harga. pada bagian Input, kelemahan meliputi data produksi yang tidak valid, ketidakpatuhan terhadap buku log elektronik, timbangan pelabuhan yang tidak terintegrasi, dan tenaga kerja yang terbatas untuk pengawasan. Proses menunjukkan bahwa perhitungan PNBP didasarkan pada laporan kapal rather than penjualan aktual, tanpa sistem *No Pay - No Sail* dan audit data silang. Akhirnya, produk menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan PNBP, menyebabkan kerugian pendapatan negara dan peningkatan kewajiban, bertentangan dengan tujuan fiskal dan keberlanjutan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa perbaikan terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan strategi peningkatan PNBP PHP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Program PNBP PHP memiliki kebutuhan dan tujuan yang belum terpenuhi terkait kebijakan perikanan, peningkatan pendapatan, kesadaran nelayan, dan peraturan yang lebih sederhana. Kebijakan saat ini tidak sepenuhnya mendukung penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan kenaikan biaya menjadi beban. Ada risiko signifikan kehilangan pendapatan akibat penangkapan ikan ilegal, dan kesadaran nelayan tentang PNBP perlu ditingkatkan. Sistem perizinan yang rumit menghambat pengelolaan perikanan, mendorong pemerintah untuk bekerja pada peraturan yang lebih baik.
- b. Evaluasi PNBP PHP menunjukkan peningkatan pendapatan negara, respons yang bervariasi dari pelaku usaha, dan fokus pada keberlanjutan serta data tangkapan yang akurat. Meninjau strategi pasca-produksi dan dampak perpanjangan lisensi penting untuk membandingkan kinerja, mengidentifikasi kebutuhan, dan menilai dampak terhadap keberlanjutan sumber daya dan ekonomi bagi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, Muh, Avita Ransi Etania, and Fikhri Aufl Alviyani. 2024. "Pentingnya Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Kendali Akuntansi* 2(2): 1–9. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jka-widyakarya/article/view/2958/2664>
- Albert S. Humphrey. 2005, "analysis for management consulting"
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Kajian Tata Kelola Utang Negara Untuk Pembangunan Nasional." (July): 1–47.
- BPK, Tahun 2024 LHP KKP
- BRI. 2023. "Resiliensi Yang Kuat, Keberlanjutan Yang Hebat." <https://bri.co.id/documents/20123/56786/SR BRI IND.pdf>.
- Dwi Septiani, Fera. 2023. "Krisis Keuangan dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan dan Strategi Khusus pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *JAMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10(3): 2180–92. doi:10.35794/jmbi.v10i3.52756.
- Fatimah YA, Govindan K, Murniningsih R, Setiawan A, A sustainable circular economy approach for smart waste management system to achieve sustainable development goals: Case study in Indonesia, *Journal of Cleaner Production* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122263>
- Hafiz Defarahmi & Zulkifli. (2017). Dampak Defisit Anggaran dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 2(4), 618–625. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10>
- Halim, Evelyne Julian. 2023. "Keberlanjutan Blue Bonds di Indonesia: Peluang dan Risiko." *UNES Law Review* 6(2): 5380–86.
- Hasanah, Agnes Indriani, Hayat Hayat, Suyeno Suyeno, Taufiq Rahman Ilyas, and Afifudin Afifudin. 2024. "Peran United Nations Development Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Bidang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Kuat di Indonesia." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 11(2): 550–63. doi:10.37606/publik.v11i2.1187.
- Hasanah, H. (2017). "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)". *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hastuti, 2018 Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomor 2–November2018* ISSN (print): 2598-0696 55 (PNBP) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia.
- Hertini, E., & Gusriani, N. (2013). Maximum Sustainable Yield (MSY) Pada Perikanan dengan Struktur Prey-Predator. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir*, 307–311.
- Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media. kelas IV Tegal. *Jurnal Strategik Manajemen*,

- 10(2).
- Isti'anah, and Eko Setiyo Utomo. 2023. "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)." *Jurnal Administrasi Publik* 19(2): 298–322. doi:10.52316/jap.v19i2.189.
- Kurniasih, D.A. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213–228
- Magazzino C. (2014). The relationship between revenue and expenditure in the ASEAN countries, *East Asia*, 31(3), 203-221. Marshela, 1(1), 39-46.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. 2023. "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11(2): 341–48. doi:10.46368/jpd.v11i2.902.
- Miles dan Huberman, (1984) *Model Analisis Data*
- Monoarfa, Suharso. 2023. "Na Ruu Tentang Rpjpn." Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045: 1–356.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02, 200.
- Muhammad Farrel Arkan dan Haula Rosdiana, (2024), Evaluasi kebijakan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi: studi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia
- Muhammad Tahrulloh, dkk (2021). Analisis Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun Anggaran 2016-2020. *Gorontalo Fisheries journal*. 4(1), 14–26.
- Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 128–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270>
- Patricia, W. (2020). Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Popi Tri Astuti & Hari Kaskoyo (2024, Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Melalui Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL)
- R. Erman Jaya Kusuma (2021), Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian/Lembaga
- Ramadhani, M., Gafari, M.O.F., & Marice, M. (2019). Development Of Interactive Learning Media On Material Writing Short Story Texts Based On Experience. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, <https://doi.org/10.33258/birle.v2i1.189>
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

- Robert, Kates, Thomas Parris, and Anthony Leiserowitz. 2005. "What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47: 8–21. doi:10.1080/00139157.2005.10524444.
- Rosser, A. (2001). *The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market*
- Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. *Journal of Personality* 40. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_2.
- Saefullah, A., Djadja, 2007, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*, Sardjoko, Subandi, Hadiat, Fitri Amalia, Mudaris Ali Masyhud, Eddy Satriya, Randy Wrihatnolo, Sidqy L.P. Suyitno, et al. 2023. *Menuju Indonesia Emas: Refleksi Dan Visi Pembangunan 2005-2045*.
- Setiawan, Asep, Djoni Gunanto, Hamka, and Yusuf Saputra. 2022. "Analisis Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dan Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2022." *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*: 1–11. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>.
- Setyoningrum, D., & Purwanti, E. Y. (2020). Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002-2016. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(2), 741–750
- Siagian, Sondang P., 2016. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Silalahi, S., Al Musadieq, M., & Nurtadjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Sitepu, M. H., Fadly, Z. R., Ariana, M., Darondo, F. A., & Hanifah, A. (2023).
- Sofyandi, A U S, dkk. (2023) Efektivitas Pelayanan Paspor Menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (1)
- Stufflebeam, 2003. *Komponen Model CIPP SUB*." "Paper_S3-Hutang-V."doi:10.14710/jebt.2024.22805.
- Sucita, A., Lestari, D., Angraini, F., Selpiyanti, S., & Walid, A. (2020). Evaluasi Pembelajaran Biologi Di Sman 10 Kota Bengkulu Menggunakan Model Countenance Stake. *Jurnal Muara Pendidikan*, 5(1), 488–498. <https://doi.org/10.52060/mp.v5i1.200>
- Suhaidi, Muhammad. 2022. "Pengaruh Defisit Anggaran, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02): 2167–82.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Syofandani, Albima Umari., dkk. (2023). Efektivitas Pelayanan Paspor Menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (1).
- Tinton Ditisrama et al. (2022), *Fungsi budgetary dan regulatory penerimaan*

Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia

- Ussadiyah, Nisa. 2022. “Peran Pinjaman Luar Negeri Dalam Apbn Pada Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia.” *Journal Of Development Economic and Digitalization* 1(1): 1–10. file:///C:/Users/AQIL PPTNGN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Z4LO60U I/adminjded,+Jurnal+3_Nisa+Ussa'diyah[1].pdf.
- Wardhana, Irwanda Wisnu, Andi Nugroho Suryo Kuncoro, and Bayu Rahmat Rahayu. 2021. “Gagasan Milenial Untuk Pengelolaan Keuangan Negara.”: 244.
- Wiwiek Patricia & Bambang Pamungkas (2020), *Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A